

**ASESMEN LAPANGAN CAPAIAN SDGs BIDANG HUNIAN
LAYAK TERJANGKAU DAN TRANSPORTASI PUBLIK
PADA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Alde Rama Toriko

NPM: 1811060428

Program Studi : Pendidikan Biologi



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**ASESMEN LAPANGAN CAPAIAN SDGs BIDANG HUNIAN
LAYAK TERJANGKAU DAN TRANSPORTASI PUBLIK
PADA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Sarjana S1 pada Program Studi
Pendidikan Biologi

Oleh:

**Alde Rama Toriko
NPM: 1811060428**

Program Studi : Pendidikan Biologi

**Pembimbing I: Dr Eko Kuswanto, M.Si
Pembimbing II: Anisa Oktina Sari M.Pd**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah inisiatif pembangunan global yang merangkul semua negara tanpa memandang tingkat perkembangannya. SDGs, yang juga dikenal sebagai Tantangan Pembangunan PBB 2030, terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu tujuannya adalah mencapai hunian layak terjangkau dan akses transportasi publik, yang merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 11.

Penelitian ini bertujuan untuk asesment capaian SDGs bidang hunian layak terjangkau dan transportasi publik. Populasi penelitian mencakup semua kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, dengan sampel sebanyak 400 responden yang dipilih secara proporsional melalui teknik penarikan sampel acak. Metode penelitian yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. Prosedur penelitian dilakukan dengan observasi data awal, wawancara dan angket. Kemudian analisis menggunakan tabulasi Microsoft Excel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 400 responden aasesmen pada persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap hunian layak terjangkau ditemukan 71% hunian yang sudah mencukupi kelayakan yang sesuai dengan tujuan ke 11 dari SDGs . Kemudian Asesment transportasi publik yang dilakukan di Lampung Timur di peroleh data bahwa (95%) yang belum mendapatkan akses nyaman tranportasi publik. Artinya hanya sedikit (yaitu 5%) responden yang mendapatkan akses nyaman transportasi publik, sangat jarang pemukiman warga yang dekat dengan halte, terminal dan statiuon, rata-rata jarak pemukiman warga ke halte 0,5 km sebagaimana yang disebutkan di pedoman (Bappenas, 2020) tujuan ke 11 SDGDs.

Kata Kunci: SDGs, Hunian Layak, Transportasi Publik, Lampung Timur

ABSTRACT

The Sustainable Development Goals (SDGs) are global development initiatives that embrace all countries regardless of their level of development. The SDGs, also known as the UN Development Challenge 2030, consist of three main pillars, namely social, economic, and environmental development. One of the goals is to achieve affordable housing and access to public transportation, which is the 11th Sustainable Development Goal.

This research aims to assess the achievement of SDGs in the field of affordable housing and public transportation. The research population covers all sub-districts in East Lampung Regency, with a sample of 400 respondents selected proportionally through random sampling techniques. The research method used is Stratified Random Sampling. The research procedure was carried out by initial data observation, interviews and questionnaires. Then the analysis uses Microsoft Excel tabulation.

The results of the study showed that from 400 assessment respondents on the percentage of households that have access to affordable housing, 71% of housing was found to be sufficient in accordance with the 11th goal of the SDGs. Then the public transportation assessment carried out in East Lampung obtained data that (95%) have not received comfortable access to public transportation. This means that only a few (that's 5%) respondents get convenient access to public transportation, very rarely residential areas close to bus stops, terminals and stations, the average distance of residential areas to bus stops is 0.5 km as mentioned in the guidelines (Bappenas, 2020) to the 11th destination of SDGs.

Keywords: SDGs, Decent Housing, Public Transportation, Lampung Timur

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alde Rama Toriko
NPM : 18110600428
Jurusan/Prodi : Pendidikan Biologi
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Asesmen Lapangan Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGS) Bidang Hunian Layak Terjangkau Dan Transportasi Publik Pada Kabupaten Lapung Timur” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 Juli 2024
Penulis,



Alde Rama Toriko
NPM. 1811060428



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **ASESMEN LAPANGAN CAPAIAN SDGs**
BIDANG HUNIAN LAYAK TERJANGKAU
DAN TRANSPORTASI PUBLIK PADA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : **ALDE RAMA TORIKO**
NPM : **1811060428**
Jurusan : **Pendidikan Biologi**
Fakultas : **Tarbiyah dan Keguruan**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eko Kuswanto, M.Si


Anisa Oktina Sari Pratama M.Pd

NIP : 197505142008011009

NIP : 202112011911029100

Ketua Program Studi,


Dr. Heru Juabdin Sada, M.Pd.I

NIP : 198409072015031001

IV



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung
35131 telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul “Asesment Lapangan Capaian SDGs Bidang Hunian Layak Terjangkau dan Transportasi Publik pada Kabupaten Lampung Timur” yang disusun oleh: **Alde Rama Toriko, NPM 1811060428**, Program Studi Pendidikan Biologi telah diujikan pada sidang Munaqosyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juni 2024 pukul 14.30 – 16.00 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Drs. Sa'idy, M.Ag**

Sekretaris : **Iqlima Amelia, M.Si**

Penguji I : **Dr. Yuni Sahtiningrum, M.Si**

Penguji II : **Dr. Eko Kuswanto, M. Si**

Penguji II : **Anisa Oktina Sari Pratama, M. Pd.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd.

NIP. 19640828 198803 2 002

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ هُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(Q.S Al-Baqarah 216)

“..... padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak M.Alpian dan Ibunda Ratna Dewi tercinta yang telah membesarkanku, mengasuhku, mendidik, membimbing dan memberikan kasih sayang dan do'a kepadaku, yang semua itu tidak mungkin terbalas olehku.
2. Adinda tersayang adikku Devia Rina Dwi Tika yang selalu memberikan semangat, perhatian, kekuatan, dukungan dan selalu mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak sudah menjadi adik kesayanganku yang mandiri, tangguh, sabar dan selalu manja menjadi anak bungsu. Semoga kelak kita dapat mengangkat derajat kedua orangtua dan menjadi anak yang membanggakan.
3. Keluarga besarku baik dari ayah maupun ibu yang senantiasa selalu memberikan semangat, kasih sayang, dukungan, kekuatan, motivasi dan mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan motivasi, nama nama nama
5. Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang akan selalu ku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alde Rama Toriko. Penulis putra dari 2 bersaudara, dilahirkan di Oku Timur pada tanggal 09-05-1999 dari pasangan. Bapak M.Alpian dan Ibu Dewi Ratna. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 5 Gumawang pada tahun 2005, pendidikan sekolah menengah pertama penulis di SMPN 1 Belintang dan pendidikan menengah atas penulis di MAN 1 Oku Timur pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 penulis meneruskan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Biologi. Selain itu peneliti juga telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan masyarakat seperti, KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) di Desa Tegal Rejo Kab Oku Timur pada bulan Juni-Juli 2021, Penulis juga telah melaksanakan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA 2 Perintis pada bulan oktober 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di beberapa kegiatan intra maupun ekstra kampus. Penulis berpartisipasi di organisasi intra kampus pada **UKM** (Unit Kegiatan Mahasiswa) sebagai pengurus **KSE** (Kelompok Studi Ekologi) **Uin Ril** tahun 2020-2021, Menjadi Wakil Ketua **HIMAPIBIO** (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi) Pada tahun 2019-2020. Pada kegiatan ekstra kampus penulis juga bergabung pada organisasi **HMI** (Himpunan Mahasiswa Islam), Penulis juga aktif kegiatan social di Yayasan Respek Peduli Lampung pada tahun 2021-2022.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan seperti apa yang diharapkan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam dalam Ilmu Tarbiyah pada Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Eko Kuswanto, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
3. Ibu Annisa Oktarina Sari Pratama M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
4. Bapak Dr. Heru Juabdin Sada M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pend Biologi UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staff yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian.
7. Rekan-rekan yang telah memberi bantuan baik petunjuk atau berupa saran-saran, sehingga penulis senantiasa mendapat informasi yang sangat berharga. Semoga amal baik Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua

akan diterima oleh Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	10
H. Alur Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sejarah SDGs.....	15
B. Prinsip-Prinsip SDGs	17
C. Hunian Layak.....	17
D. Transportasi Publik	21
E. Sanitasi Layak.....	24
F. Lampung Timur	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Prosedur Peneltian	37

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai acuan awal yang jelas untuk menggambarkan serta mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini adalah “**Asesmen Lapangan Capaian Sustainable Development Goals (SDGS) Bidang Hunian Layak Terjangkau Dan Transportasi Publik Pada Kabupaten Lapung Timur:**” Berikut ini penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, antara lain:

1. Asesmen

Asesmen adalah suatu proses untuk memperoleh sebuah informasi secara menyeluruh berupa data-data yang akan diteliti dalam sebuah bentuk tes, asesmen dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu penelitian.

2. *SDGs (Sustainable Development Goals)*

Sustainable Development Goals (SDG's) atau yang disebut juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berlandaskan pada 3 pilar yaitu pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan serta didukung pilar Tata Kelola. TPB ini terdiri atas 17 tujuan (goals) dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. *SDG's* adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi.

3. Hunian Layak

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan social. Sejalan dengan SDGs Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space), akses air minum (access to improved water), akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of tenure) 3. Menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi kualitas lingkungan hidup, maka implementasi SDGs 2030 merupakan langkah penting untuk mewujudkan kota layak huni secara terpadu dan berkelanjutan SDGs merupakan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pada proses pembangunan.

4. Tranportasi Layak

Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. Transportasi publik adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berjalur, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum adalah jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang atau orang dengan dipungut bayaran

UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih.

Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro. Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya kota metropolitan dan kota besar perlu ada sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh 37 jaringan angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.

B. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) atau agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan agenda global hasil kesepakatan bersama yang disetujui oleh 193 negara termasuk Indonesia. Kesepakatan tersebut berisikan 17 tujuan dan 169 target dan 319 indikator yang perlu dicapai pada tahun 2030 yang tercakup menjadi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.¹

Menyikapi 17 tujuan global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana

¹ Nonik Rensiana Putri, Skripsi: Asesmen Lapangan Capaian SDGS Bidang Air Bersih DAN Sanitasi Layak Pada Zona V Kota Bandar Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), Hal. 12

investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan untuk mempermudah memahami *SDGs*, terdapat 4 pilar yang telah mencakup 17 tujuan agenda ini. Maksud dari dikelompokkannya 17 tujuan menjadi 4 pilar adalah untuk mempermudah pemantauan 4 pilar tersebut.

Adapun 4 pilar itu yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar ini mencakup tanpa kemiskinan, Tanpa kelaparan Kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ini mencakup Energi bersih dan terjangkau, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri, Inovasi dan infrastruktur, Berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar ini mencakup Air bersih dan sanitasi layak, Kota dan pemukiman layak, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Penanganan perubahan iklim, Ekosistem laut dan ekosistem darat.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar ini mencakup Perdamaian, keadilan, dan Kelembagaan yang kuat.²

Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama ditingkat global merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan berkelanjutan. Menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi kualitas lingkungan hidup, maka implementasi *SDGs* 2030 merupakan langkah penting untuk mewujudkan kota layak huni secara terpadu dan berkelanjutan. *SDGs* merupakan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pada proses pembangunan.



Gambar 1.1: Sustainable Cities And Communities

Sumber: Bappenas, 2022

² Nuke Sania Lorenzea, Skripsi: Asesmen Lapangan Capaian SDGS Bidang Air Bersih DAN Sanitasi Layak Pada Zona IV Kota Bandar Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), Hal. 5

Penduduk perkotaan memberikan tuntutan besar bahkan kadang-kadang tidak terpenuhi atas persediaan air bersih, sistem pembuangan kotoran, pengaturan sampah, perumahan, dan transportasi yang aman dan layak. Diseluruh negara berkembang, diperkirakan sedikitnya 220 juta penduduk kota tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih, lebih dari 420 juta orang tidak memiliki akses ke WC umum, satu dua pertiga sampah padat yang dihasilkan tidak terkumpul, dan lebih dari 1,1 milyar orang tinggal diwilayah perkotaan dengan polusi udara keamanan. Perkembangan suatu kota tidak terlepas dari jumlah penduduk yang terus meningkat ini tentu menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana yang memadai.³Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang terus meningkat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya kemampuan untuk membangun tempat tinggal yang layak dan semakin terbatasnya lahan. perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat.

Rumah adalah suatu nikmat dari Allah yang terkadang bahkan sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah mengingatkan kita akan kenikmatan ini dalam surah An-Nahl ayat 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ^٤ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

³ Tri Rena Mayasari,"Pengelompokkan Provinsi Berdasarkan Variabel Kesehatan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018", Jurnal Siger Matematika. 4(4) 2020:28

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan ayat diatas bahwa Allah SWT mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hamba-Nya, berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh dari panas dan hujan dan berlindung dari segala macam bahaya di dalamnya.

Hunian rumah yang layak artinya menjadi peranan penting untuk ditingkatkan sebagai sarana tempat tinggal manusia berdasarkan surat An-nahl tersebut, oleh karena itu memerlukan tingkat kelanjutan yang tinggi untuk tolak ukur agar tercapainya target global maupun nasional mengenai pembangunan berkelanjutan agar tercipta rumah yang layak huni dan nyaman untuk ditempati.

Lampung Timur adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Sukadana. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.101.977 jiwa, Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah Bepadan". Sebelumnya, kabupaten Lampung Timur bagian dari Kabupaten Lampung Tengah.⁴

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam Monitoring Framework, terdapat 5

⁴ Tiara Ajeng Safitri. Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Melalui Program Open Defecation Free(ODF) Di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. 2022:99

kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*). 11 Bidang Hunian Layak Terjangkau dan Transportasi Publik merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada poin ke-11 *SDGs*. Hak atas perumahan layak merupakan hak yang melekat pada diri manusia untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang aman, damai dan bermartabat. Hak ini tidak berdiri sendiri, ia memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak lainnya, seperti hak atas hidup damai, nyaman, tentram, aman, bahagia dan sejahtera, hak atas jaminan kesehatan, hak atas lingkungan sehingga pelanggaran atas perumahan dapat menyebabkan sejumlah hak lain ikut terlanggar.⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Asesmen Lapangan Capaian SDGs Bidang Hunian Layak Terjangkau Dan Transportasi Publik Pada Kabupaten Lampung Timur”** Penelitian ini dilakukan karena urgensifitas asesmen lapangan poin 11 *SDGs* yang terfokus di Lampung Timur. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak terjangkau, proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, dan melakukan asesmen persentase penduduk terlayani transportasi umum.

⁵ Qodariyanti, Laifa. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Sebagai Upaya Terwujudnya Pilar Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 3(3). 2023. hal: 86

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka fokus dan sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus
Penelitian ini berfokus pada Asesmen Lapangan Capaian SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.
2. Sub Fokus Penelitian
Sub fokus penelitian ini yaitu Asesmen Lapangan Capaian SDGs bidang hunian layak dan terjangkau dan akses nyaman transportasi publik. Pengambilan sampel dilakukan di wilayah kabupaten lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapakah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Lampung Timur?
2. Berapakah persentase penduduk yang sudah terlayani pada transportasi publik di Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak terjangkau
2. Untuk mengetahui persentase penduduk yang terlayani pada transportasi publik.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi peneliti dan bagi dunia pendidikan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk pengimplentasian strategi konsep ruang layak huni dan dapat menjadi acuan atau alat ukur untuk mengukur suatu rumah tangga dapat dikatakan layak huni atau tidak
3. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber informasi serta referensi dalam penelitian berkaitan dengan hunian layak terjangkau dan transportasi public
4. Bagi pendidikan hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hunian yang layak terjangkau dan transportasi publik.

G. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian mengenai asesmen lapangan capaian SDGs bidang hunian layak terjangkau dan transportasi publik telah dilakukan diantaranya:

1. Dampak Relokasi Permukiman Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat (2019) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pasca relokasi pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat. Penelitian ini menggunakan 50 sampel yang dipilih secara acak. Melalui metode Paired Samples Test, ditemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan keluarga di

Rumah Susun Jatinegara Barat sebesar Rp.642.800,00 di mana rata-rata pendapatan keluarga sebelum direlokasi lebih besar dibandingkan setelah direlokasi. Kemudian, terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran keluarga di Rumah Susun Jatinegara Barat sebesar Rp.1.027.660,00 di mana rata-rata pengeluaran keluarga sebelum direlokasi lebih kecil dibandingkan setelah direlokasi. Sementara itu, pada kondisi sosial masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat ditemukan perbedaan pada interaksi sosial antar warga, yang mana setelah direlokasi masyarakat menjadi individual dibandingkan sebelum direlokasi. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian diatas berfokus pada dampak relokasi permukiman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di rumah susun Jatinegara Barat. Sedangkan penelitian saya berfokus pada asesmen lapangan capaian SDGs hunian layak terjangkau dan transportasi publik pada Kabupaten Lapung Timur.

2. Dari penelitian Ishartono dan Santoso (2020) dalam penelitian yang berjudul *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Pengentasan Kemiskinan. Menurut temuan penelitian, pekerjaan sosial harus berada di garis depan inisiatif untuk memerangi kemiskinan jika konsep hak asasi manusia harus dihormati secara keseluruhan. MDGs, yang kemudian digantikan oleh SDGs, adalah tujuan bersama yang membutuhkan kerja sama baik pada sumbu vertikal maupun horizontal.
3. Dari penelitian Mandra (2021) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Tinggal di Rumah Sederhana Untuk Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Ikan Sei Banyak, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu). Berdasarkan temuan studi tersebut, pemerintah telah membuat beberapa inisiatif untuk memerangi kemiskinan, salah satunya adalah hunian dasar yang boleh dihuni. Bagi orang miskin yang sangat membutuhkan sandang, pangan, dan papan, papan adalah

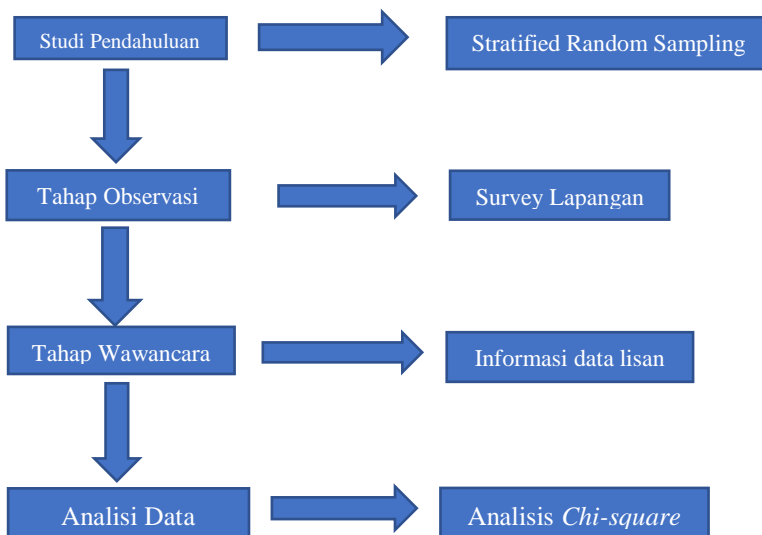
kebutuhan. Selain itu, inisiatif yang berfokus pada penelitian sangat bermanfaat dalam membantu Kabupaten Kelayang memerangi kemiskinan.

4. Dalam penelitian Muhammad Fardan Ngoyo (2019) dalam penelitian yang berjudul *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. Temuan studi ini akan membantu menyelaraskan arah pembangunan dan mengawasi pembangunan berkelanjutan dengan cara yang lebih demokratis dan berkeadilan. Orientasi tersebut mengacun pada 17 tujuan dalam kerangka SDGs yang telah diadaptasi oleh negara anggota PBB hingga tahun 2030. Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, makan partisipasi masyarakat sipil harus diberikan secara lebih terbuka. Salah satunya dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan *Sustaiable Libelihood Approach (SLA)* sehingga dapat menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan.
5. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)* TH (2020). Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015 merumuskan 17 poin Sustainable Development Goals (SDG's) untuk menanggulangi permasalahan yang ada di dunia, seperti kemiskinan, pemanasan global, serta menjawab isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di perkotaan. Salah satu tujuan yang terdapat dalam SDG's adalah pada tujuan no. 11 (sebelas) yaitu Sustainable Cities and Communities. Salah satu permasalahan dunia yang dibahas dalam tujuan ini yaitu permukiman kumuh yang terdapat pada poin 11.1, dimana permasalahan ini masih banyak ditemukan di dunia, salah satunya di kawasan DAS Metro, Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan prinsip SDG's

yang dijelaskan dalam tujuan 11 poin 11.1. Penelitian ini melewati 3 tahap analisis, yaitu tahap pertama untuk mengetahui kesesuaian kebijakan yang ada di Kota Malang dengan prinsip SDG's. Tahap kedua yaitu menentukan karakteristik permukiman kumuh yang ada di kelurahan sekitar DAS Metro yaitu Kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo. Dan tahapan terakhir yaitu merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh menggunakan metode analisis triangulasi. Hasil dari penelitian ini berupa strategi penanganan permukiman kumuh yang dirinci berdasarkan hasil karakteristik yang didapatkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang hunian layak terjangkau dan transportasi publik ada beberapa yang sudah dilakukan, akan tetapi penelitian asesmen lapangan capaian SDGs bidang hunian layak dan terjangkau belum pernah dilakukan di Lampung Timur.

H. Alur Penelitian



I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada proposal ini dengan judul “Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Pendidikan Biologi Ditinjau Dari Konsep Diri dalam Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) yaitu terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab yang diantaranya yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Penulisan, dan Metodologi Penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan landasan teori mengenai Sejarah SDGs, Prinsip-prinsip SDGs, Hunian Layak, Transportasi publik dan Kabupaten Lampung Timur.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai sampel dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi operasional penelitian, instrument penelitian, dan analisis data

5. Daftar Pustaka rujukan berisi tentang sumber-sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah SDGs (Sustainable Development Goals)

Millennium Development Goals (MDGs) adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala Negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada Bulan September tahun 2000. Sebelum pelaksanaan (MDGs) berakhir, pada UNSummit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia setelah 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “The Future We Want” dalam UN Conference on Sustainable Development 2012.⁶

Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan setelah tahun 2015 yang disepakati dalam Sidang umum PBB pada bulan September tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksana nyata terkelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Development (pengembangan) adalah kata benda yang dapat menggambarkan negara, pola pertumbuhan atau perubahan kemajuan atau kemunduran secara virtual setiap fenomena dan aktivitas yang diketahui. Pengembangan dapat berhubungan dengan alam semesta kosmik, lingkungan bumi

⁶ Sulistyani Prabu aji, and Drajat Tri Kartono. "Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Journal of Social Research*.1(6) 2022. Hal: 508

dan ekologi, kemajuan ekonomi global, pertanian dan industri regional dan nasional dan banyak beragam dan komponennya berkelanjutan secara harfiah diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang tidak berubah, tindakan yang diambil untuk mencegah sistem atau entitas dari kolaps.

Bertempat di Markas Besar PBB, pada tahun 2015 para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan yang berkelanjutan, meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Komitmen tersebut diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).⁷

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi,

⁷ Papatungan, Frezy. "Get to know the Sustainable Development Goals (SDGs)." *Journal of Hulonthalo Service Society (JHSS)* 2(2). 2023

sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan.

B. Prinsip-prinsip SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan, MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait.⁸ Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

C. Hunian Layak

Pemenuhan hak asasi manusia untuk mengatasi permasalahan penduduk miskin dapat dimulai dari pemenuhan hak atas perumahan dan permukiman yang layak. Peningkatan jumlah perumahan dan permukiman yang tidak layak semakin

⁸ Panulah, Sekar and Melia Riskia Fitri. *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. 2016. hal: 12

meningkat yang diiringi dengan meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Pada tahun 2018, persentase rumah kumuh di perkotaan Indonesia mencapai 7,42%, angka tersebut naik secara signifikan pada tahun 2019 dengan menyentuh angka 13,86%²⁷. Isu hukum tersebut sangat urgensi untuk dibahas, yang dimana pemenuhan hak tersebut telah tercantum dalam pasal 28 H ayat 1 yang mengamanatkan bahwa tempat tinggal yang baik dan sehat merupakan hak semua orang. Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga sudah mengungkapkan secara tegas bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.⁹

Pengaturan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Permukiman dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa pembangunan perumahan harus meliputi ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Di sisi lain, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan empat kriteria rumah layak huni yang meliputi struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan, sanitasi yang baik serta ketersediaan jaringan air bersih. Dalam SDGs, pembangunan kota dan pemukiman berkelanjutan terdapat dalam tujuan ke-11. Tujuan ini kemudian diturunkan kedalam 7 target yang hendak dicapai pada 2030, yaitu:

⁹ A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal: 12

1. Perumahan yang aman dan terjangkau.
2. Sistem transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan.
3. Urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan
4. Perlindungan atas warisan budaya dan alam
5. Mengurangi dampak bencana alam
6. Mengurangi dampak lingkungan pada perkotaan
7. Menyediakan akses inklusif untuk melindungi ruang hijau dan public

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDGs Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).¹⁰

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat:
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu, sirap, dan seng.

¹⁰ A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal: 12

- b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok, GRC board, plesteran anyaman bambu kawat, kayu, papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer, granit, keramik, parket, vinyl, karpet, ubin, papan, dan semen atau bata merah.¹¹
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²
3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak. Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal.

¹¹ A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal: 12

Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman dan hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau. Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.¹²

D. Hunian Layak Terjangkau

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan

¹² Ibid, 9.

bermukim (*security of tenure*). Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2m^2$
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat

pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), METADATA EDISI II 33 masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Adapun kriteria hunian layak pada skripsi ini menggunakan acuan metadata SDGs Indonesia tahun 2017 sebagai berikut.

No.	Komponen	Kriteria
1	Ketahanan Bangunan	<p>Bahan Bangunan atap terluas adalah genteng, beton, Kayu/Sirap, dan Seng</p> <p>Bahan Bagunan dinding terluas adalah tembok/GRC Board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.</p> <p>Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah</p>
2	Kecukupan Luas tempat Tinggal	Luas lantai per kapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$
3	Akses terhadap Air Minum Layak	Mengikuti indikator dan metode perhitungan sasaran 6.1.1 (a) terkait akses air minum layak.
4	Akses terhadap Sanitasi Layak	Mengikuti indikator dan metode perhitungan sasaran 6.2.1 (a) terkait akses sanitasi layak.

Sumber: *Metadata SDGs Indonesia, 2017*

E. Transportasi Publik

Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berjalur, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro. Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota, misalnya kota metropolitan dan kota besar perlu ada sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu ada sistem transportasi berbasis bus, dan kota kecil dapat dilayani oleh

jaringan angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.¹³

Persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan atau angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.

Perhitungan :

Jumlah penduduk yang memiliki akses transportasi umum yang nyaman dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%)

Rumus :

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PHLT	Persentase rumah tangga hunian layak
JRTHLT	Jumlah rumah tangga hunian layak
JRT	Jumlah rumah tangga seluruhnya

F. Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.

Sarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menyediakan dan mendistribusikan air

¹³ A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal: 12

tersebut kepada masyarakat. Sarana air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan, agar tidak mengalami pencemaran sehingga dapat diperoleh kualitas air yang baik sesuai dengan standar kesehatan. Ada berbagai jenis sarana air bersih yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumur gali (SGL), sumur pompa tangan (SPT), perpipaan, dan penampungan air hujan (PAH). (Depkes RI, 1977 dalam Marjuki, 2008).

Kualitas air adalah standar kualitas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82/2001 yang digunakan sebagai parameter air yang meliputi aspek fisik, kimia, biologi (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82/2001).

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Air tanah merupakan sumber daya penting dalam irigasi, industri dan air minum makin meluas. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan tampak dari kebutuhan

terhadap air untuk keperluan sehari-hari dilingkungan rumah tangga ternyata berbeda-beda di setiap tempat, setiap tingkatan, kehidupan atau setiap bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf kehidupan seseorang semakin meningkat pula kebutuhan manusia akan air. Jumlah penduduk dunia setiap hari bertambah, sehingga mengakibatkan jumlah kebutuhan air.

Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat mengambil air dari dalam tanah, air permukaan, atau langsung dari air hujan. Dari ke tiga sumber air tersebut air tanahlah yang paling banyak digunakan karena air tanah memiliki beberapa kelebihan di banding sumber-sumber lainnya antara lain karena kualitas airnya yang lebih baik serta pengaruh akibat pencemaran yang relatif kecil (Jovita, 2002 : 1).

Target SDGs tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Pencatatan indikator Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman.

- a. **Akses tidak tersedia** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan.
- b. **Akses tidak layak** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung.
- c. **Akses layak terbatas** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit.

- d. **Akses layak dasar** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang.
- e. **Akses aman** adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; cara menyetatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.

Sarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menyediakan dan mendistribusikan air tersebut kepada masyarakat. Sarana air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan, agar tidak mengalami pencemaran sehingga dapat diperoleh kualitas air yang baik sesuai dengan standar kesehatan. Ada berbagai jenis sarana air bersih yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumur gali (SGL), sumur pompa tangan (SPT), perpipaan, dan penampungan air hujan (PAH). (Depkes RI, 1977 dalam Marjuki, 2008).

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan

dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.¹⁴

a. **Akses Aman** adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

b. **Akses Layak Sendiri** adalah:

- 1) Apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik;
- 2) Untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

¹⁴ A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal: 12

- c. **Akses Layak Bersama** adalah:
- 1) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD
 - 2) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/ cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta
 - 3) apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll).
- d. **BABS tertutup** adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya. Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau yang dikenal juga dengan Open Defecation Free (ODF). Kondisi Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Mencuci tangan dengan sabun dan air. Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup.¹⁵

¹⁵ A. Halim Iskandar. SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal: 12

Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari sub-sistem pengolahan setempat (tangki septik). Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke perairan.

Lampung Timur

Lampung Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini terletak di sebelah tenggara Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Kota Sukadana. Secara geografis, Lampung Timur memiliki beragam keindahan alam, mulai dari pantai-pantai yang memikat, hingga pegunungan yang hijau. Salah satu destinasi populer di Lampung Timur adalah Taman Nasional Way Kambas, yang terkenal dengan populasi gajah sumatranya serta menjadi tempat konservasi dan penelitian satwa liar.

Masyarakat Lampung Timur mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya. Selain itu, kerajinan tangan tradisional juga cukup berkembang di daerah ini. Dalam aspek budaya, Lampung Timur memiliki kekayaan budaya Lampung yang khas, seperti tarian dan musik tradisional. Festival Budaya Lampung sering diadakan di berbagai kota dan kabupaten di Lampung, termasuk Lampung Timur, untuk mempromosikan dan mempertahankan warisan budaya yang kaya.¹⁶

¹⁶ Lampungtimur.gov.id

Dengan perpaduan antara keindahan alam, kearifan lokal, dan kegiatan budaya yang beragam, Lampung Timur menawarkan pengalaman yang menarik bagi para pengunjung dan juga merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi penduduknya.

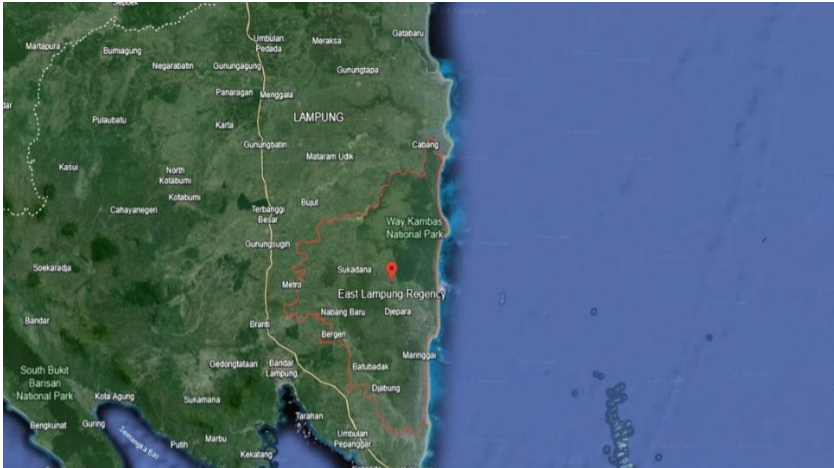
Kabupaten Lampung Timur terletak di Provinsi Lampung, Pulau Sumatera, Indonesia. Secara geografis, Lampung Timur berada di bagian tenggara Pulau Sumatera. Berikut adalah beberapa koordinat geografis Lampung Timur: - Garis lintang: 5°00' - 6°00' LS- Garis bujur: 104°25' - 105°00' BT

Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Lampung, yaitu:

- Sebelah Utara: Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang
- Sebelah Barat: Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Way Kanan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Timur: Selat Sunda dan Provinsi Bengkulu

Ibu kota Kabupaten Lampung Timur adalah Kota Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.710,83 km². Dengan letaknya yang strategis di bagian selatan Pulau Sumatera, Lampung Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beragam dan menjadi daerah yang penting dalam konteks ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung.¹⁷

¹⁷ Lampungtimur.gov.id



Peta Kabupaten Lampung Timur

Sumber :

<https://earth.google.com/web/search/Lampung+Timur,+Lampung>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lampung Timur dapat disimpulkan

1. Hasil penelitian dari 400 responden aasesmen pada presentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap hunian layak terjangkau ditemukan 71% hunian yang sudah mencukupi kelayakan yang sesuai dengan tujuan ke 11 dari SDGs
2. Berdasarkan hasil penelitian transportasi publik yang dilakukan di Lampung Timur masih banyak yang belum mendapatkan akses nyaman transportasi publik, terdapat 95% dari 400 orang yang tidak mendapatkan akses transportasi publik. Kemudian hanya 5% yang mendapatkan akses nyaman transportasi publik. Artinya masih banyak responden yang belum mendapatkan akses nyaman transportasi publik, sangat jarang pemukiman warga yang dekat dengan halte, terminal dan stasiun, rata-rata jarak pemukiman warga ke halte 0,5 km sebagaimana yang disebutkan di pedoman tujuan ke 11 SDGDs.

Dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan hampir separuh masyarakat di Lampung Timur rumah yang ditempati sudah memenuhi kriteria hunian layak terjangkau. Rumah atau tempat tinggal adalah bagian dari kebutuhan manusia dari kebutuhan ketiga atau tersier (pangan, sandang, papan). Pada pemenuhannya, rumah mesti memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek dalam pembangunannya termasuk keamanan dan kenyamanan.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya hunian layak terjangkau dan transportasi publik meningkatkan tercapainya SDGs indikator sanitasi layak pada kabupaten Lampung Timur.
2. Ada baiknya jika dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai capaian SDGs bidang hunian layak terjangkau dan transportasi publik yang lebih jauh dengan jumlah responden lebih banyak agar data yang diperoleh semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm. 105
- Agustian, Achmad Dinan, Ratna Widyawati, and Muh. Sarkowib. Analisis Dan Target Capaian Air Minum Kabupaten Way Kanan. Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP). 2.2 (2022) <https://doi.org/10.23960/snip.v2i2.324>
- Amalia, Rina rizki, dan Jehan Ridho Izaharyah. Fungsi Directing Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program SDGs (Sustainable Development Goals) di Desa Tani Makmur Rengat Barat. Jurnal Kesejahteraan sosial, komunikasi dan administrasi public. 1 No.1 (April 2022): 40–43.
- Amrul, hasan, haris kadamusman, dan agus sutopo. Air Minum, Sanitasi, dan Hygiene sebagai Faktor Risiko Stunting di Wilayah Pedesaan. Jurnal Kesehatan. 13 No.2 (Mei 2022): 301–4.
- Arifin Rudiyanto, Msc, Metadata Indikator Edisi II Pilar Pembangunan Lingkungan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs), Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020.
- Ayu Oktaviani Musri, Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals Sdgs Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2020, h.31
- Aziz, Azwirida. Pelayanan Sanitasi Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Geografi. 8 No.2 (2019): 114. Badan Pusat Statistik (2018). Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018. Badan Pusat Statistik.Jakarta. 54 Ben Satriatna (2015). Menyongsong SGD's Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Lampung. Unpad Press.
- Darajati, dan Jusuf. Metadata Indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs Indonesia. Pilar Pembangunan Lingkungan. 2017, 34–38.
- Davik, Farouk Ilimid. Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis masyarakat Pilar stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo. Jurnal administrasi kesehatan Indonesia. 4 no 2 (Desember 2016): 107–9.

- Herniwanti, edi sudarto, dan ardiana. Penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 – Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Bengkalis, Riau. *Jurnal Abdidas* vol 3 no.3 (2022): 466–71.
- Khopifah Andriani dan Susilawati. Pengelolaan Sanitasi Stop BAB (Buang Air Besar) Pada Wilayah Pesisir Pantai Pandan Sibolaga. *International Journal Labs*. 2022
- Leo No Mersil, Skripsi: Pengetahuan Pendidikan Kesehatan Menggunakan Video Pembelajaran Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Cuci Tangan Pada Siswa Sekolah Dasar: Literature Review,(Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2021)
- Mardiyani, S. A. et al. Edukasi Praktek Cuci Tangan Standar WHO dan Peduli Lingkungan, *Jurnal pembelajaran pemberdaya Gambar 6. Acara Santunan (JP2M)*. 2020 1(2).
- Mayasari, T. R. CLUSTERING AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (Clustering of Clean Water Access and Worth Sanitation in District / City Lampung Province). *Fungsional Statistisi Pertama BPS Kabupaten Pesawaran*, 2019, 563–72 55
- Mayasari, T. R. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Variabel Kesehatan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Siger Matematika*. 4(4) 2020:28
- Miola, Apollonia, and Fritz Schiltz. Measuring Sustainable Development Goals Performance: How to Monitor Policy Action in the 2030 Agenda Implementation? *Ecological Economics*, 164.May (2019), 106373 <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106373>
- Mustikawati, I. S. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun Studi Kualitatif pada Ibu-Ibu di Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara; Studi Kualitatif, *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 2(1), 2017. 115–125
- Nonik Rensiana Putri, Skripsi: Asesmen Lapangan Capaian SDGS Bidang Air Bersih DAN Sanitasi Layak Pada Zona V Kota Bandar Lampung. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2002)
- Nuke Sania Lorenzea, Skripsi: Asesmen Lapangan Capaian SDGS Bidang Air Bersih DAN Sanitasi Layak Pada Zona IV Kota Bandar Lampung (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

- Nurzanah, Tri noviyanti, zakianis, bambang wispriyono, dan Athena. Sanitasi dan air minum di daerah perkotaan dan pedesaan di provinsi Bengkulu (analisis data potensi desa 2018). *Jurnal ekologi Kesehatan*. 18 No.3 (Desember 2019): 160–69.
- Putra, Dito Pratama, Ferizal Masra, and Nawan Prianto, PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH RUMAH PERSADA KOTA BANDAR LAMPUNG, 16.2 (2022), 108– 12
- Rahman, H., & Patilaiya, H. La. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2 No.2 (2018):251 56
- Rina Susanti, Rifardi & Yoskar Kadarisman. Peran Masyarakat Dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 3 No.3 (2021) : 1253-1263
- Safitri, Tiara Ajeng. Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Melalui Program Open Defecation Free(ODF) Di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. 2022:99
- Saputri, Widya, Universitas Maritim, Raja Ali, Khodijah Ismail, Universitas Maritim, and Raja Ali. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030 Zero Hunger(Goal2) Ilmu Kelautan Dan Perikanan June, 2021, 4–14 <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27974.6048>